

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat pesisir di Indonesia tidak hanya menghadapi keterbatasan secara ekonomi dan fisik, tetapi juga kerentanan sosial yang khas. Kehidupan sehari-hari masyarakat pesisir sangat bergantung pada relasi sosial, kerja sama antarwarga, serta dukungan lingkungan sekitar. Dalam kondisi hunian yang padat dan sarana lingkungan yang terbatas, hubungan sosial merupakan modal sosial yang berperan penting dalam mempertahankan keberlangsungan kehidupan masyarakat pesisir. Namun, tekanan lingkungan seperti keterbatasan ruang, sanitasi yang kurang memadai, dan kualitas interaksi sosial antarwarga, sehingga berpotensi menurunkan kesejahteraan sosial masyarakat pesisir. Permukiman yang rendah dapat memengaruhi kenyamanan hidup serta kualitas interaksi sosial antarwarga (Sexton, 2024)

Kerentanan sosial masyarakat pesisir meningkat akibat banjir rob, abrasi pantai, dan genangan air laut yang terjadi secara berulang tidak hanya merusak rumah secara fisik, tetapi juga mengganggu aktivitas sosial masyarakat. Ketika lingkungan tempat tinggal sering terdampak bencana, warga cenderung mengalami rasa tidak aman, kecemasan, dan ketidakpastian dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang pada akhirnya memengaruhi kualitas kesejahteraan sosial masyarakat. Situasi ini dapat melemahkan partisipasi sosial dan menurunkan kualitas hubungan

antara anggota masyarakat, terutama pada kelompok rumah tangga berpenghasilan rendah (Putiamini et al., 2022).

Studi di wilayah pesisir utara Jawa menunjukkan bahwa kondisi hunian yang buruk dan tekanan lingkungan yang berulang berdampak langsung pada kehidupan sosial masyarakat. Rumah yang sering rusak akibat banjir rob atau abrasi membuat keluarga harus berulang kali melakukan perbaikan, sehingga menguras sumber daya ekonomi, waktu, serta kapasitas sosial rumah tangga. Dalam jangka panjang, kondisi ini berkontribusi pada meningkatnya beban psikologis, menurunnya rasa aman, serta berkurangnya kesempatan warga untuk terlibat aktif dalam kegiatan sosial dan ekonomi (Putiamini et al., 2022).

Di tengah kondisi tersebut, masyarakat pesisir sangat mengandalkan solidaritas sosial dan gotong royong sebagai mekanisme bertahan. Namun, ketergantungan yang tinggi pada jaringan sosial ini juga membuat kondisi sosial masyarakat menjadi rentan ketika hubungan antarwarga terganggu, misalnya akibat ketimpangan bantuan, keterbatasan sumber daya, atau konflik kepentingan. Oleh karena itu, kondisi sosial masyarakat pesisir perlu dipahami sebagai aspek penting dalam menilai kualitas hidup mereka, bukan hanya sebagai pelengkap dari aspek ekonomi dan fisik semata. Berbagai kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan masyarakat pesisir tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik permukiman, tetapi juga berdampak pada dimensi kesejahteraan sosial masyarakat.

Kesejahteraan sosial masyarakat pesisir tidak dapat dilepaskan dari kondisi lingkungan hidup dan pola relasi sosial yang terbentuk di wilayah pesisir. Secara konseptual, kesejahteraan sosial dipahami sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan

material, sosial, dan psikologis sehingga individu mampu hidup layak dan menjalankan fungsi sosialnya secara optimal (Fahrudin, 2014:10). Dalam konteks masyarakat pesisir, pemenuhan kesejahteraan sosial sangat dipengaruhi oleh kualitas hunian, rasa aman terhadap lingkungan, serta keberfungsian hubungan sosial antarwarga. Permukiman pesisir yang padat, rentan bencana, dan memiliki keterbatasan prasarana sering kali membatasi kemampuan masyarakat untuk menikmati kehidupan sosial yang stabil dan berkelanjutan.

Midgley (2014) menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial bukan hanya soal peningkatan kondisi ekonomi individu, tetapi juga tentang bagaimana kebijakan sosial dan lingkungan sosial memungkinkan masyarakat mengurangi risiko sosial dan meningkatkan peluang hidup (*life chances*). Pada masyarakat pesisir, risiko sosial seperti banjir rob, abrasi, dan ketidakpastian tempat tinggal berkontribusi langsung pada menurunnya kesejahteraan sosial, terutama dalam bentuk rasa tidak aman, tekanan psikologis, dan melemahnya partisipasi sosial. Ketika rumah dan lingkungan tempat tinggal tidak memberikan rasa aman, masyarakat cenderung fokus pada upaya bertahan hidup, sehingga keterlibatan dalam aktivitas sosial dan pengembangan diri menjadi terbatas (Midgley, 2014:18-20).

Lebih lanjut, kesejahteraan sosial masyarakat pesisir juga berkaitan erat dengan dimensi *subjective well-being*, seperti rasa puas terhadap kehidupan, kenyamanan tinggal, dan persepsi terhadap kualitas hubungan sosial. Literatur kesejahteraan subjektif menyebutkan bahwa kondisi lingkungan tempat tinggal yang aman dan layak memiliki pengaruh kuat terhadap perasaan sejahtera, rasa tenang, dan kepuasan hidup individu (Diener et al., 2020). Dalam komunitas pesisir,

di mana kehidupan sosial sangat bergantung pada kedekatan antarwarga dan kerja sama sehari-hari, gangguan lingkungan dan hunian dapat menurunkan kualitas hubungan sosial dan rasa memiliki terhadap komunitas.

Kesejahteraan sosial sering kali berada pada tingkat sedang hingga rendah, terutama pada aspek rasa aman, kenyamanan tinggal, dan partisipasi sosial. Keterbatasan akses terhadap layanan dasar, kualitas hunian yang rendah, serta tekanan lingkungan yang terus-menerus membuat masyarakat pesisir berada dalam kondisi rentan secara sosial, meskipun mereka memiliki jaringan sosial yang relatif kuat (Putiamini et al., 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial masyarakat pesisir tidak cukup diukur dari pendapatan atau pekerjaan semata, tetapi harus dilihat secara lebih luas melalui kualitas hidup sosial yang mereka alami sehari-hari.

Oleh karena itu, kesejahteraan sosial masyarakat pesisir merupakan konsep multidimensi yang mencakup rasa aman, kualitas hubungan sosial, partisipasi dalam kehidupan komunitas, serta kepuasan hidup yang dipengaruhi oleh kondisi hunian dan lingkungan. Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, pemerintah menghadirkan kebijakan di bidang perumahan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kebijakan tersebut diwujudkan melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang diluncurkan pada tahun 2006 oleh Direktorat Rumah Swadaya, Direktorat Jenderal Perumahan (2022). Artinya, pada tahun 2022 program tersebut telah memasuki tahun ke-15.

Program ini dirancang untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh rumah layak huni melalui pendekatan swadaya dan partisipatif.

Program ini dirancang membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh rumah layak huni melalui pendekatan swadaya dan partisipatif, sehingga sejalan dengan gagasan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar merupakan prasyarat penting bagi keberfungsian sosial masyarakat (Fahrudin, 2014:10). Sejak program ini diluncurkan, secara kumulatif program ini diperkirakan telah menjangkau lebih dari dua juta unit rumah hingga tahun 2024. Sejak diluncurkan pada tahun 2006, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) telah berjalan selama kurang lebih dua dekade dan menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam peningkatan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah.

Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus. Peraturan tersebut mengatur bentuk bantuan, besaran dana, kriteria penerima, serta mekanisme teknis pelaksanaan, sekaligus menggantikan Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2018. Hingga tahun 2023, Program BSPS masih dilaksanakan dengan target yang terus diperbarui. Berdasarkan data hingga Agustus 2023, sedikitnya 106.435 unit rumah telah menjadi sasaran Program BSPS, dengan target lebih besar pada tahun-tahun selanjutnya Antara News (2024).

Dalam kerangka pembangunan sosial, BSPS dapat diposisikan sebagai intervensi yang tidak hanya memperbaiki kondisi material hunian, tetapi juga berpotensi mengurangi kerentanan sosial karena rumah yang lebih aman dan layak menciptakan rasa tenang serta kepastian tempat tinggal yang lebih baik (Midgley,

2014:18-21). Selain perbaikan fisik hunian, Program BPSPS juga dilaksanakan melalui mekanisme yang menekankan swadaya, gotong royong, kerja kelompok, dan pendampingan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).

Proses ini secara langsung menyentuh aspek sosial kehidupan masyarakat karena melibatkan musyawarah, koordinasi, kerja bersama, dan interaksi antarwarga, sehingga berpotensi meningkatkan kualitas hubungan sosial, partisipasi warga, serta rasa kebersamaan dalam lingkungan permukiman. (Rajun et al., 2025). Penelitian (Esariti et al., 2020) menunjukkan bahwa perbaikan hunian berkaitan dengan meningkatnya rasa aman dan kenyamanan psikologis keluarga, yang pada akhirnya dapat mendukung kehidupan sosial yang lebih stabil. Literatur mengenai kesejahteraan subjektif juga menjelaskan bahwa kondisi tempat tinggal yang lebih aman dan layak berkaitan dengan meningkatnya rasa sejahtera dan kepuasan hidup, termasuk dalam dimensi sosial kehidupan sehari-hari (Diener et al., 2020).

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2022, sasaran utama Program BPSPS adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan kriteria yang wajib dipenuhi sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia (WNI): Dibuktikan dengan kepemilikan KTP Elektronik yang valid.
2. Telah berkeluarga: Program ini diprioritaskan bagi mereka yang sudah memiliki tanggungan keluarga.
3. Memiliki atau menguasai tanah secara sah yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau penguasaan hak atas tanah.

4. Rumah yang diusulkan merupakan satu-satunya rumah yang dimiliki dan berada dalam kondisi tidak layak huni.
5. Belum pernah menerima bantuan serupa dalam 10 tahun terakhir.
6. Melaksanakan Pembangunan secara berkelompok melalui prinsip swadaya masyarakat.

Bagi masyarakat pesisir, rumah yang lebih layak berpotensi meningkatkan rasa aman, kenyamanan hidup, serta keberfungsian sosial keluarga, seperti meningkatkan ketenangan dalam beraktivitas, kenyamanan menerima tamu, dan rasa percaya diri ketika berinteraksi dengan masyarakat. Temuan Annisya (2020) menunjukkan bahwa setelah BSPS, dampak sosial BSPS menunjukkan skor rata-rata 294 dari total maksimal 400, atau setara dengan 73,52%, yang berada pada kategori baik. Secara rinci, indikator rasa aman memperoleh skor tertinggi yaitu 314 poin, diikuti partisipasi sosial 303 poin, kepercayaan diri 290 poin, dan kondisi psikologis-sosial 269 poin. Temuan ini menunjukkan bahwa perbaikan hunian melalui BSPS paling kuat dirasakan pada peningkatan rasa aman dan partisipasi sosial, sementara aspek psikososial meskipun meningkat, masih relatif lebih rendah dibanding indikator lainnya. Selain itu, Esariti et al., (2020) menegaskan bahwa rumah yang lebih layak bagi penerima BSPS berfungsi sebagai tempat berlindung yang memberi keamanan dan kenyamanan, sekaligus dapat memperkuat status sosial keluarga dan mendukung aktivitas penghidupan.

Kawasan Kampung Bugis di Kota Tanjungpinang, merupakan permukiman pesisir yang berkembang di tepi maupun di atas perairan, dengan karakter rumah panggung dan kepadatan bangunan yang relatif tinggi. Kondisi permukiman seperti

ini menjadikan kehidupan sosial masyarakat sangat bergantung pada kedekatan antar tetangga, kerja sama komunitas, dan aktivitas kolektif sehari-hari. Namun, tingginya kepadatan permukiman dan keterbatasan ruang juga dapat menurunkan kenyamanan sosial, mengurangi privasi keluarga, serta meningkatkan potensi gesekan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan Profil Kelurahan Kampung Bugis yang diperoleh penulis dari Kantor Kelurahan Kampung Bugis, jumlah penduduk yang tergolong dalam rumah tangga miskin mencapai 2.366 kepala keluarga pada tahun 2025. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan Kelurahan Kampung Bugis sebagai lokasi penelitian.

Kajian permukiman menunjukkan bahwa Kelurahan Kampung Bugis masih menghadapi berbagai permasalahan kekumuhan, terutama yang berkaitan dengan kondisi bangunan, kualitas jalan lingkungan, pengelolaan persampahan, serta sistem proteksi kebakaran (Sunarto & Pangestu, 2022). Selain menghadapi persoalan kekumuhan, Kampung Bugis juga memiliki karakteristik khas sebagai kawasan permukiman pesisir. Genangan air pasang dan tingkat kelembapan lingkungan yang tinggi menyebabkan bangunan lebih cepat mengalami kerusakan sehingga meningkatkan kebutuhan pemeliharaan rumah (Sunarto & Pangestu, 2022). Kondisi tersebut memengaruhi kehidupan sosial masyarakat karena warga harus terus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berubah. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat mengurangi rasa aman dalam bermukim, menurunkan kepuasan terhadap lingkungan tempat tinggal, serta membatasi partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial akibat sebagian energi dan sumber daya keluarga dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan pemeliharaan hunian.

Hasil pengamatan awal menunjukkan adanya beberapa persoalan yang masih ditemukan dalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Sebagian penerima mengalami kesulitan memenuhi unsur swadaya, baik berupa tambahan dana maupun tenaga kerja. Akibatnya, proses pembangunan atau peningkatan kualitas rumah tidak selalu dapat berjalan sesuai dengan rencana. Di sisi lain, ditemukan indikasi bahwa rumah yang telah memperoleh bantuan tidak seluruhnya dimanfaatkan sesuai tujuan program. Pada beberapa kasus, rumah yang telah diperbaiki tidak lagi ditempati oleh pemiliknya, melainkan disewakan kepada pihak lain. Kondisi tersebut dapat memunculkan persepsi yang berbeda di tengah masyarakat mengenai keadilan pelaksanaan program, bahkan berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan BSPS di tingkat lokal.

Selain itu, Kampung Bugis merupakan komunitas yang padat dan saling terhubung, perbedaan status antara penerima dan non-penerima BSPS juga berpotensi memengaruhi dinamika sosial setempat. Mengingat karakter masyarakat Kampung Bugis yang hidup dalam komunitas dengan interaksi sosial yang erat, perbedaan status antara penerima dan nonpenerima bantuan dapat memengaruhi dinamika hubungan sosial di lingkungan tersebut. Pemahaman masyarakat yang berbeda terhadap tujuan maupun mekanisme Program BSPS dapat memunculkan kesalahpahaman, ketegangan sosial, hingga munculnya kecemburuan di antara warga. Sebaliknya, apabila pelaksanaan program dilakukan secara terbuka, transparan, dan mengedepankan prinsip gotong royong, Program BSPS justru dapat

memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mempererat hubungan antarwarga.

Hasil wawancara pendahuluan menunjukkan bahwa masyarakat memahami BSPS sebagai program yang mengutamakan partisipasi penerima bantuan. Ketua RT 003/RW 006 yang berinisial DI menjelaskan bahwa BSPS bukan merupakan bantuan yang membiayai seluruh kebutuhan pembangunan rumah, melainkan bantuan stimulan yang tetap mensyaratkan adanya swadaya dari masyarakat penerima. Bentuk swadaya tersebut dapat berupa tenaga kerja, tambahan material, maupun dukungan keluarga dan lingkungan sekitar melalui kegiatan gotong royong. Temuan awal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan BSPS tidak hanya berkaitan dengan perbaikan kondisi fisik rumah, tetapi juga melibatkan proses sosial yang mendorong interaksi, kerja sama, dan partisipasi masyarakat.

Selain mekanisme swadaya, Kriteria penerima Program BSPS tidak semata-mata didasarkan pada besaran pendapatan, melainkan mengacu pada kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum mampu membiayai pembangunan maupun peningkatan kualitas rumah secara mandiri. Penetapan calon penerima dilakukan melalui proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual oleh pemerintah daerah bersama tenaga fasilitator lapangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2022. Sedangkan untuk besaran bantuan dalam program BSPS juga dapat berbeda-beda antar penerima karena menyesuaikan tingkat kebutuhan perbaikan rumah. Besaran bantuan Program BSPS disesuaikan dengan tingkat kerusakan rumah dan kebutuhan penanganan yang telah ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi lapangan. Dengan

demikian, nilai bantuan yang diterima setiap penerima dapat berbeda sesuai kondisi rumah dan jenis intervensi yang diperlukan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa Program BSPS menerapkan prinsip bantuan yang bersifat proporsional sesuai kebutuhan penerima.

Meskipun Program BSPS dirancang sebagai instrumen kebijakan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada aspek implementasi kebijakan dan hasil fisik pembangunan rumah. Kajian mengenai dampak sosial program terhadap kehidupan masyarakat, seperti rasa aman, kualitas hubungan antarwarga, partisipasi sosial, maupun kepuasan hidup, masih relatif terbatas. Padahal, bagi masyarakat pesisir seperti Kampung Bugis, perubahan kondisi hunian tidak hanya memengaruhi kualitas fisik rumah, tetapi juga berpengaruh terhadap dinamika sosial yang berkembang di lingkungan permukiman.

Beberapa penelitian telah membahas dampak sosial Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Namun, pembahasan tersebut umumnya masih menjadi bagian pelengkap dari evaluasi pelaksanaan program atau dipadukan dengan analisis dampak ekonomi. Akibatnya, dimensi kesejahteraan sosial belum banyak dikaji sebagai fokus utama penelitian. Penelitian Annisya (2020) menunjukkan bahwa pelaksanaan BSPS memberikan dampak sosial yang tergolong baik, terutama pada aspek partisipasi masyarakat, rasa aman, dan kondisi psikologis penerima. Namun, penelitian tersebut dilakukan pada wilayah non pesisir sehingga belum menggambarkan dinamika sosial masyarakat pesisir yang memiliki karakteristik lingkungan berbeda. Penelitian Esariti et al. (2020) juga menjelaskan

bahwa perbaikan hunian berkaitan dengan meningkatnya rasa aman dan kenyamanan psikologis penerima. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada makna rumah bagi penerima bantuan dari pada mengkaji perubahan kondisi sosial masyarakat secara lebih luas.

Permukiman pesisir memiliki karakteristik yang berbeda dengan kawasan permukiman lainnya karena tingkat kerentanan lingkungannya relatif lebih tinggi. Ancaman banjir rob, abrasi, dan degradasi lingkungan dapat memengaruhi stabilitas kehidupan sosial masyarakat. Sebagian besar penelitian mengenai masyarakat pesisir masih berfokus pada kerentanan lingkungan dan risiko bencana, sedangkan kajian mengenai pengaruh program perumahan pemerintah terhadap kesejahteraan sosial masyarakat pesisir masih relatif terbatas. Sementara itu, Penelitian mengenai BPS pada umumnya masih berfokus pada aspek pelaksanaan program maupun hasil fisik pembangunan rumah.

Kajian yang secara khusus memisahkan dampak sosial dan dampak ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat masih terbatas, terutama pada kawasan permukiman pesisir. Sebagai gambaran pelaksanaan Program BPS di Kelurahan Kampung Bugis, berikut disajikan data jumlah penerima bantuan berdasarkan rekapitulasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tanjungpinang selama periode 2018-2023.

Tabel 1. 1 Jumlah Penerima Perbaikan Rumah di Kelurahan Kampung Bugis Tahun 2018-2023

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2018	63
2	2019	183
3	2020	0
4	2021	114

NO	TAHUN	JUMLAH
5	2022	0
6	2023	1
TOTAL		361

Sumber: Rekapitulasi Dinas PERKIM Kota Tanjungpinang (2026)

Berdasarkan tabel diatas, jumlah penerima program perbaikan rumah di Kelurahan Kampung Bugis mengalami perubahan pada setiap tahun. Untuk memperjelas perbandingan jumlah penerima dari tahun 2018-2023, data tersebut dapat disajikan dalam bentuk diagram batang (*grafik column*) dibawah ini:

Gambar 1.1 Jumlah Penerima Program Perbaikan Rumah di Kelurahan Kampung Bugis Tahun 2018-2023



Sumber: Dinas PERKIM Kota Tanjungpinang (2026)

Berdasarkan diagram batang tersebut, jumlah penerima program perbaikan rumah di Kelurahan Kampung Bugis mengalami fluktuasi dari tahun 2018-2023. Jumlah penerima tertinggi tercatat pada tahun 2019 sebanyak 183 rumah tangga, kemudian tahun 2021 sebanyak 114 rumah tangga, dan tahun 2018 sebanyak 63 rumah tangga. Pada tahun 2020 dan 2022 tidak terdapat penerima program, sedangkan pada tahun 2023 hanya terdapat 1 penerima. Kondisi ini menunjukkan

bahwa pelaksanaan program perbaikan rumah di Kampung Bugis tidak berlangsung secara merata setiap tahun, melainkan bergantung pada alokasi program dan kebijakan bantuan pada masing-masing tahun.

Berdasarkan kondisi tersebut, celah penelitian dalam studi ini terletak pada upaya menjadikan kesejahteraan sosial masyarakat pesisir sebagai fokus utama analisis, dengan mengkaji dampak sosial dan dampak ekonomi Program BPS sebagai faktor yang memengaruhi kesejahteraan sosial masyarakat. Penelitian ini tidak hanya memandang BPS sebagai program perbaikan fisik rumah, tetapi juga sebagai kebijakan yang memengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat penerima.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis pengaruh dampak sosial (X1) dan dampak ekonomi (X2) BPS terhadap kesejahteraan sosial rumah tangga pesisir (Y) di Kampung Bugis, Kota Tanjungpinang. Dengan menjadikan masyarakat pesisir sebagai fokus penelitian, studi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kontribusi Program BPS terhadap peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, tidak hanya melalui perbaikan kondisi fisik hunian, tetapi juga melalui perubahan kondisi sosial masyarakat penerima bantuan. Secara khusus, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kondisi kesejahteraan sosial rumah tangga penerima Program BPS di kawasan pesisir. Temuan penelitian diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah dalam penyempurnaan kebijakan perumahan agar tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas fisik rumah, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat secara

berkelanjutan, khususnya di kawasan pesisir yang memiliki tingkat kerentanan sosial dan lingkungan yang tinggi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah dampak sosial Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berpengaruh terhadap kesejahteraan sosial rumah tangga pesisir di Kampung Bugis?
2. Apakah dampak ekonomi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berpengaruh terhadap kesejahteraan sosial rumah tangga pesisir di Kampung Bugis?
3. Apakah dampak sosial dan dampak ekonomi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) secara simultan berpengaruh terhadap kesejahteraan sosial rumah tangga pesisir di Kampung Bugis?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dampak sosial dan dampak ekonomi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terhadap kesejahteraan sosial rumah tangga masyarakat pesisir di Kampung Bugis, Kota Tanjungpinang.

1.4 Manfaat Penelitian

Salah satu manfaat penelitian ini adalah memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Sosiologi, dengan

memperkaya kajian mengenai kemiskinan, kebijakan sosial, dan program pembangunan perumahan. Penelitian ini juga menjadi sarana bagi penulis untuk menerapkan konsep dan teori yang diperoleh selama menempuh pendidikan di Program Studi Sosiologi, terutama yang berkaitan dengan dinamika kesejahteraan sosial masyarakat pesisir, hubungan antara intervensi kebijakan pemerintah dan perubahan kondisi sosial-ekonomi rumah tangga, serta peran program pembangunan dalam meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini akan meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai pengelolaan program bantuan perumahan seperti BSPS serta kaitannya dengan kesejahteraan sosial masyarakat pesisir. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan bagi penelitian serupa di masa yang akan datang, terutama yang mengkaji dampak program pemerintah terhadap kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.